



Tantangan Yang Dihadapi UMKM Kecil: Bantuan Fasilitas Permodalan Pedagang Kaki Lima Kelurahan Siranindi Kota Palu

Nandita Fradina

Universitas Tadulako

Lutfiani

Universitas Tadulako

Andita Triana

Universitas Tadulako

Rahdiyatul Zahra

Universitas Tadulako

Hj Suasa

Universitas Tadulako

Dandan Haryono

Universitas Tadulako

Nurhayati Hamid

Universitas Tadulako

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No.KM.9.

Korespondensi penulis: nanditafradinasingke@email.com

Abstrak. *UMKM are an important pillar in the Indonesian economy, including in Palu City. One of the most common types of UMKM in Palu City is street vendors, which play an important role in providing goods and services at affordable prices to the community. However, despite their large contribution, street vendors often face various challenges, especially in terms of access to capital facilities. This study aims to identify the challenges and constraints faced by street vendors in Palu City in accessing capital facilities provided by the government and other financial institutions. The method used was a qualitative approach with a case study, involving in-depth interviews with two street vendors. Street vendors face several major obstacles, such as unfamiliarity with application procedures, low levels of financial literacy, and conditions that are considered burdensome. This study recommends that the government and financial institutions simplify application procedures, improve socialization programs, and provide assistance for street vendors to facilitate access to existing capital facilities.*

Keywords: *UMKM, Street Vendors, Capital Facilities, Challenges, Palu City*

Abstrak.

UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Palu. Salah satu jenis UMKM yang paling banyak ditemukan di Kota Palu adalah pedagang kaki lima (PKL), yang berperan penting dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, meskipun kontribusinya besar, PKL sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh PKL di Kota Palu dalam mengakses fasilitas permodalan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan satu pedagang kaki lima. PKL menghadapi beberapa kendala utama, seperti ketidakpahaman terhadap prosedur pengajuan, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan adanya syarat-syarat yang dianggap memberatkan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga keuangan melakukan penyederhanaan prosedur pengajuan, meningkatkan program sosialisasi, dan memberikan pendampingan bagi PKL untuk mempermudah akses ke fasilitas permodalan yang ada.

Kata Kunci: *UMKM, Pedagang Kaki Lima, Fasilitas Permodalan, Tantangan, Kota Palu*

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di palu merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian, baik dari segi kontribusi terhadap PDB maupun penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan dari badan pusat statistik (BPS), sekitar 99% dari seluruh pelaku usaha di palu merupakan UMKM, dengan sebagian besar diantaranya bergerak di sektor informal, sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Di kota palu, PKL berperan sebagai pendorong ekonomi lokal, memberikan akses barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat luas. Namun, meskipun banyak inisiatif pemerintah yang berfokus pada pemberian fasilitas permodalan, untuk mendukung pertumbuhan UMKM, PKL di palu sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang dapat membantu memperbesar usaha mereka.

Menurut Gede Diva (2009 :15-18), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Menurut Partomo (2004:2) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha baik di sektor tradisional maupun modern. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha yang sangat besar perannya dalam mendukung dalam perekonomian masyarakat, namun pengelolanya masih belum memiliki kapasitas sebagaimana yang diperlukan. Pengusaha mikro, kecil dan Menengah pada umumnya dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan rendah dan melakukan usahanya secara tradisional

Menurut Darwanto, (2008:22) beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi Usaha Kecil Menengah banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Menurut Irawan dan Suparmoko (1997), untuk strategi pengembangan pasar dalam negeri, tersedianya sumber daya alam sebagai bahan mentah merupakan prasyarat utama. Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup, tenaga kerja dengan skill yang memadai, maka pengembangan sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri. Dengan perkataan lain barang produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor.

Salah satu kendala yang dihadapi UMKM yaitu kurangnya permodalan. Kurangnya permodalan UMKM disebabkan karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi (Handini, Sukei, & Kanty, 2019).

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dan observasi awal yang sebelumnya dijelaskan, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan terkait masalah yang dihadapi oleh UMKM mengenai fasilitas permodalan yaitu salah satunya kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat, sehingga para UMKM kecil seperti PKL di daerah belum terjangkau informasi tentang program bantuan fasilitas permodalan UMKM.

Ketersediaan permodalan baik dari pemerintah dan bantuan lewat sebuah program sangatlah dibutuhkan. Bantuan modal UMKM adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu (pemodal) kepada pelaku usaha. Diberikan untuk dapat membantu para pelaku usaha agar dapat mengembangkan bisnis yang ingin dibangun atau yang sudah dijalankan dalam bentuk bantuan modal usaha perorangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tantangan dan kendala yang dihadapi oleh PKL dalam mengakses fasilitas permodalan, khususnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan Lembaga keuangan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana tantangan tersebut mempengaruhi pertumbuhan usaha dan apa solusi yang dapat di usulkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dua (2) minggu mulai akhir bulan November hingga awal Desember 2024. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Siranindi, Kota Palu. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan dorongan, fasilitas dan modal dalam membuat usaha Mikro di Kota Palu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . Penelitian ini bertipe dasar fenomenologi yaitu, penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan dalam kaitannya dengan kendala UMKM kecil PKL.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi, wawancara secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan kendala UMKM kecil PKL di di Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Siranindi, Kota Palu. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui referensi jurnal berkaitan dengan obyek penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui betul tentang objek penelitian ini. Adapun jumlah informan adalah satu orang PKL.

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk teks yang diperluas. Adapun tahapan/langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data dan Sajian Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian di kecamatan palu barat kelurahan siranindi. yang peneliti wawancarai seorang PKL yaitu ibu norma

Ibu norma membuka usaha warung di pinggir jalan sudah belasan tahun dan mengelola usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun kendala yang dialami ibu norma selama menjalankan usahanya yaitu mengalami kekurangan modal. Usaha yang dikelola ibu norma pun menjadi tempat tinggal tetap. Metode penjualan yang dilakukan oleh ibu norma hanya dengan secara offline atau menetap di tempat penjualannya. Omset yang dihasilkan oleh penjualan ibu norma yaitu sekitar Rp 200.000 – Rp 300.0000 perhari. Sumber modal awal yaitu dari modal pribadi dari ibu norma aitu sekitar Rp 5.000.000 untuk keseluruhan pembiayaan modal untuk membuka usahanya.

Motivasi ibu norma untuk membuka usaha yaitu untuk membiayai hidup nya sendiri. Ibu norma kecewa karena kenaikan harga barang pasar sehingga membuat harga barang yang dijualkan ibu norma pun ikut naik, jadi ibu norma mencari tempat penjualan barang pasar yang

lebih murah. Adapun kendala lainnya yang dihadapi oleh ibu norma yaitu banyaknya orang yang berhutang dalam pembelian barang di tempat penjualannya sehingga ibu norma sulit untuk memutar kembali modal.

Rencana jangka Panjang dari usaha ibu norma yaitu memiliki asset berupa tanah, membeli motor dan juga bisa mengembangkan usaha yang dikelolanya. Ibu norma juga menjadi juru parkir di daerah dekat dengan tempat usahanya.

Dari analisis peneliti mengenai wawancara dari kedua informan maka peneliti menemukan beberapa kendala sebagai berikut:

Kendala dalam Mengakses Permodalan

Berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima di Kota Palu, beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mengakses fasilitas permodalan adalah sebagai berikut:

Kurangnya Pemahaman terhadap Prosedur Pengajuan yaitu sebagian besar pedagang kaki lima tidak memahami prosedur administrasi yang diperlukan untuk mengajukan fasilitas permodalan. Beberapa pedagang mengaku kesulitan memahami persyaratan yang harus dipenuhi, seperti laporan keuangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap sulit diperoleh.

Rendahnya Literasi Keuangan yaitu banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini membuat mereka enggan untuk mengajukan pinjaman karena takut tidak dapat mengelola dana dengan tepat.

Persyaratan yang Diperlukan untuk Mengakses Pinjaman yaitu beberapa pedagang merasa bahwa syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengakses fasilitas permodalan terlalu berat, seperti keharusan untuk memiliki jaminan atau surat izin usaha yang formal, yang sering kali tidak dimiliki oleh PKL.

Keterbatasan Akses ke Lembaga Keuangan Formal yaitu meskipun terdapat beberapa program permodalan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro dan perbankan, banyak pedagang kaki lima yang lebih memilih untuk mencari pinjaman informal, seperti dari kerabat atau rentenir, karena mereka merasa akses ke lembaga keuangan formal terbatas.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Usaha

Keterbatasan akses permodalan ini memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha PKL. Banyak pedagang yang mengaku kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka karena tidak dapat memperoleh dana yang cukup untuk memperbesar usaha, memperbaiki kualitas produk, atau mengembangkan jaringan pasar. Beberapa pedagang bahkan harus menahan usaha mereka untuk tetap kecil karena ketidakmampuan dalam memperoleh modal yang dibutuhkan.

Rekomendasi untuk Mengatasi Kendala

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PKL dalam mengakses fasilitas permodalan adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Prosedur Pengajuan Permodalan yaitu pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyederhanakan prosedur pengajuan fasilitas permodalan untuk PKL, agar lebih mudah diakses, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman keuangan yang mendalam.

Peningkatan Literasi Keuangan

Program sosialisasi tentang pengelolaan keuangan yang baik dan manfaat mengakses fasilitas permodalan perlu digalakkan, agar PKL lebih percaya diri dalam mengajukan pinjaman dan

mengelola dana dengan baik. Yaitu fasilitas Pembiayaan yang Lebih Fleksibel yaitu pemerintah dan lembaga keuangan dapat menyediakan fasilitas pembiayaan dengan syarat yang lebih fleksibel, seperti tidak memerlukan jaminan atau dengan bunga yang lebih rendah, untuk memudahkan PKL mengakses dana.

Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya penting bagi keberhasilan usaha mikro, tetapi juga merupakan faktor kunci yang dapat memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis kecil dan menengah. Seiring perkembangan bisnis mikro, penting bagi pemiliknya untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, pemilik usaha mikro dapat mengelola arus kas dengan lebih efisien, memastikan modal yang dimiliki digunakan secara optimal, serta mengurangi risiko kebangkrutan yang mungkin terjadi. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga dapat membantu pemilik usaha mikro meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis mereka. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang matang, pemilik usaha dapat mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan bisnis mereka, serta menghindari risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan finansial mereka.

Pendampingan bagi PKL yaitu program pendampingan yang melibatkan pihak ketiga atau lembaga keuangan mikro dapat membantu pedagang kaki lima dalam menyusun proposal pinjaman, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, dan memahami prosedur pengajuan dengan lebih jelas.

Betapa banyak program pemberdayaan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah misalnya program-program pembinaan UMKM, KUR dan program-program lainnya dianggap tidak mencapai target yang sebelumnya telah dirumuskan apalagi akan berdampak pada keberdayaan masyarakat. (Adil, 2014). Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pembentukan Dinas Koperasi dan UMKM bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi rakyat terutama di kota palu sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan beberapa instansi diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tambang dan Energi; Dinas Pasar; Dinas Pariwisata; dan Dinas Kesehatan Kota.

Pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan daya saing serta bertujuan untuk menekan angka pengangguran dengan cara meningkatkan semangat masyarakat untuk berwirausaha. Proses pembinaan terhadap UMKM dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari pembinaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa kendala atau hambatan dalam melaksanakan pembinaan ini. Kendala dalam pembinaan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah susahnya untuk meyakinkan pelaku usaha karena pelaku usaha tidak paham dengan usaha yang digelutinya.

Peran yang dilakukan oleh UMKM diharapkan tetap berkelanjutan, dengan bantuan dan peran pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Pada dasarnya kinerja sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam usaha bisnis tersebut dan biasanya dapat dikendalikan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar kegiatan usaha yang sulit untuk di kendalikan.

KESIMPULAN

Pedagang kaki lima di Kota Palu menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses fasilitas permodalan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka. Meskipun ada berbagai program pembiayaan dari pemerintah, kendala utama seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi, dan syarat-syarat yang memberatkan menjadi penghalang bagi PKL untuk mengakses fasilitas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, dan penyediaan fasilitas pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel untuk mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya bagi pedagang kaki lima di Kota Palu.

Perhatian pemerintah terhadap pentingnya peran dan keberadaan para usahawan UMKM dibuktikan dengan adanya wadah UMKM dan Koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Perhatian yang tinggi tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut sebagai wujud penghargaan pemerintah yang mampu menopang keberadaan ekonomi rakyat kecil dan berdampak langsung terhadap tingkat kehidupan masyarakat kalangan bawah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Pemerintah juga mengadakan pembinaan terhadap para PKL, Tujuan dari penataan, pembinaan, dan pengembangan adalah agar para PKL menjadi maju, tertata rapi (tertib), berkembang, dan meningkat pendapatannya agar dapat menjadi usaha kecil yang mandiri, menengah, maupun besar yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modal, maka akan membantu dalam pengembangan usaha baik itu modal internal maupun eksternal akan berperan penting dalam tahap produksi, pemasaran dan segala kegiatan operasional usaha tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. Kemudian dengan adanya lokasi usaha yang strategis maka akan mampu memberi daya tarik terhadap konsumen untuk membeli. Program bantuan permodalan pemerintah untuk pengembangan UMKM kecil PKL juga seharusnya bisa lebih menjangkau para PKL yang belum terjangkau mengenai bantuan fasilitas permodalan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pradana, N. W., & Sumiyana, S. (2023). *Analisis Kebutuhan UMKM Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Penalaran Hierarki Maslow Secara Organisasional*. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 260-284.
- Prakoso, M. A., & Arum, K. (2024). *Pengaruh Bantuan Modal dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul* *The Effect of Capital Assistance and Mentoring on Increasing the Income of Micro, Small and Medium Enterp. EBBANK*, 13(2), 111-122.
- Haryanti, N. (2024). *Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 1(2), 122-136.
- Nirwana, D. C., Muhammadijah, M., & Hasanuddin, M. (2017). *Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01-14.
- Hakim, M. I. R., Sugandi, Y. S., & Halimah, M. (2023). *Efektivitas program bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 619-624.
- Rosmeli, R. (2012). *Analisis Program Bantuan Modal Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (Kupem) Oleh Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi*. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 1(3), 239-244.
- Florita, A., Jumiaty, J., & Mubarak, A. (2019). *pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang*. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 346773.
- Doni, M., Sissah, S., & Nofriza, E. (2024). *Analisis Peran Bantuan Dana Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap Keberlangsungan UMKM Kecamatan Tungkal Ilir pada Tahun 2020 dan 2021*. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(5), 74-88.

- Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1(3), 14879.*
- Putri, P. P., & Prahesti, D. D. (2018). Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro. Proceeding of Community Development, 1(4), 119-34.*
- Monoarfa, I., Rachman, E., & Mohi, M. E. H. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku Umkm di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 10403-10414.*
- Riawan, R., & Kusnawan, W. (2018). Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 19(01), 31-37.*
- Rifai, M., & Soebiantoro, U. (2006). Dampak Kebijakan Pemerintah dan Pembinaan Usaha Kecil Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Lamongan. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 2(2), 114-123.*
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 8(2), 191-200.*
- Purwantoro, P., & Afrizal, A. (2024). Dampak Bantuan Modal, Pendampingan Keuangan, dan Pelatihan Pemasaran Digital oleh BAZNAS terhadap Usaha Mikro di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, 4(6).*
- Siswanti, T. (2020). Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya, 5(2).*
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 346773.*
- Purba, E., Damanik, D., Panjaitan, P., Tumanggor, B., Tambak, D. G. P., Damanik, P., ... & Wani, A. (2024). Sosialisasi Pengembangan UMKM di Nagori Silau Malaha*

Kabupaten Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 3(2), 102-109.

Agustin, I. F., & Fadil, M. (2024). PERAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 15(1), 53-60.

Rahmah, I., Kaukab, M. E., & Yuwono, W. (2020). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(2), 30-50.